

ABSTRAK

Terpuruknya perekonomian Indonesia tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak meneruskan pembangunan yang selama ini sudah berjalan, karena bangsa ini harus terus membangun dan yang sudah ada juga masih terus memerlukan *improvement*. Proyek-proyek yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk dikerjakan seperti pembangunan irigasi/pengairan dan pembuatan jalan-jalan masih harus terus dikerjakan.

PT. Hutama Karya yang bergerak di sektor jasa konstruksi harus menyiapkan strategi yang jitu untuk bisa mempertahankan eksistensinya di sektor tersebut dan salah satu hal yang berperan penting dalam kemajuan suatu badan usaha adalah sistem informasi pada badan usaha tersebut. Salah satu masalah yang membutuhkan implementasi teknologi informasi adalah tidak terdeteksinya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam Badan Usaha secara dini. Hal ini akan berdampak buruk untuk kelangsungan hidup Badan Usaha, Karena itulah sistem informasi yang baik dan benar sangat diperlukan oleh suatu Badan Usaha.

Selama ini penerapan sistem informasi dalam PT. Hutama Karya cabang VIII telah menerapkan sistem informasi yang terkomputerisasi, namun sistem tersebut hanya menunjang efisiensi kerja dan tidak memperhatikan pentingnya penerapan suatu *internal control* yang optimal dan menyeluruh pada semua bagian. Sebagai Perusahaan Milik Negara PT. Hutama Karya sangat percaya terhadap karyawannya, sehingga secara tidak sengaja karyawan-karyawan yang berkepentingan diberi kekuasaan yang sangat luas tanpa adanya kontrol terhadap karyawan tersebut. PT. Hutama Karya terlalu percaya pada anggapan semua karyawannya adalah "orang baik-baik" yang tidak mungkin memalukan tindakan manipulasi. Contohnya password yang digunakan untuk masuk ke *database* komputer bisa diketahui oleh siapa saja yang ingin menggunakan *database* tersebut.

Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan analisis atas sistem yang ada dan mengemukakan hasil analisis tersebut beserta rekomendasinya dalam karya tulis ini. Dimulai dengan adanya perubahan pada struktur organisasi, kemudian adanya suatu kode akses yang berbeda-beda tiap bagian, agar semua bagian bisa menikmati informasi yang tersedia tanpa takut, data tersebut di manipulasi oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Adanya suatu program database yang mampu membantu mengendalikan biaya untuk meminimisasi adanya kemungkinan praktek korupsi di proyek. Dan yang terakhir sebagai kelanjutan dari usaha untuk mengoptimalkan *internal control*, diperlukan adanya penggunaan dokumen-dokumen yang tepat, adanya *crosscheck* antar bagian dan otorisasi yang tepat.